

LAPORAN TAHUNAN

PERIODE 2024



PT BPR Shinta Bhakti Wedi

Laporan Tahunan

PT BPR Shinta Bhakti Wedi

Periode 2024

I. Riwayat Pendirian BPR.

Bank Perkreditan Rakyat Shinta Bhakti Wedi adalah nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Wedi dan sekitarnya. Peran BPR Shinta Bhakti wedi membantu pemerintahan dan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup social ekonomi pedesaan melalui jasa perbankan.

Seiring dengan program pemerintah waktu itu, yakni dalam rangka menggalakkan kewiraswastaan maka daerah kecamatan Wedi yang merupakan sentra industry konveksi dan disamping itu juga usaha pertanian semakin berkembang karena kesuburan lahan, penyuluhan dan teknologi pangan pertanian maka daerah Wedi sangat potensial untuk usaha perbankan dengan misi membantu permodalan sehingga usaha yang dikelola masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Apalagi karena para wiraswasta tersebut kebanyakan terdiri dari pengusaha golongan ekonomi lemah. Melihat adanya peluang tersebut telah menimbulkan gagasan para pendiriyang terdiri dari: Bpk. Drs. E. Santosa, Bpk. A. Arwadi, BA, Bpk. Y. Suwondo, Bpk. Surandi dan Bpk. Ag. Suhardjono untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat.

PT BPR Shinta Bhakti Wedi telah beroperasional di Kabupaten Klaten selama kurang lebih 30 tahun hingga 2024. Berdasarkan Akta pendirian No 02-1992.HT.01.01. TH. 94 Tahun 1994 Akta pendirian BPR Shinta Bhakti Wedi. perubahan anggaran dasar telah dilakukan terakhir pada 01 Juli 2024 No Pengesahan AHU-0041975.AH.01.02. Tahun 2024 yang melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Shinta Bhakti Wedi.

II. Penjelasan NPL.

Pencapaian OSC Kredit sampai dengan Periode Desember 2024 sebesar Rp. 64.578.129.859 dengan rasio NPL Gross 13,27 % dab NPL Nett 9,70 %. Kondisi rasio NPL harus lebih diturunkan guna mencapai rasio yang sehat guna mengurangi resiko kredit dan beban pencadangan yang dibentuk. Non-Performing Loan (NPL) dalam industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terjadi ketika kredit yang diberikan kepada nasabah mengalami gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya NPL di BPR Shinta Bhakti antara lain:

1. Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil – Resesi, inflasi tinggi, atau penurunan daya beli masyarakat dapat memengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman mereka.
2. Kegagalan Bisnis atau Usaha – Banyak nasabah BPR adalah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga jika bisnis mereka mengalami kesulitan, mereka mungkin tidak mampu melunasi kredit.

3. Kualitas Peminjam yang Buruk – Kurangnya analisis kredit yang baik dapat menyebabkan pemberian pinjaman kepada peminjam yang memiliki risiko tinggi.
4. Karakter dan kemampuan debitur yang menjadi salah satu kendala dalam kemampuan dan kemauan debitur guna memenuhi kewajiban bayar yang dimiliki.

Penanganan terhadap kredit yang masuk dalam NPL terus diupayakan dengan berbagai metode penanganan baik melalui komunikasi dan penagihan secara langsung serta mengupayakan penyelesaian melalui penjualan jaminan bagi kredit yang benar benar macet dan sudah tidak memiliki kemampuan.

III. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain.

Persaingan usaha di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga jasa keuangan semakin ketat, terutama dengan munculnya berbagai alternatif pembiayaan seperti multifinance, pegadaian, dan P2P lending. Berikut beberapa faktor utama yang dirasa BPR mempengaruhi persaingan di sektor ini:

1. Digitalisasi dan Teknologi Finansial – Lembaga keuangan berbasis teknologi (fintech) menawarkan layanan yang lebih cepat dan fleksibel, sehingga BPR harus beradaptasi dengan digitalisasi untuk tetap kompetitif.
2. Segmentasi Pasar – BPR umumnya fokus pada UMKM dan masyarakat lokal, sementara bank umum dan fintech memiliki cakupan pasar yang lebih luas.
3. Regulasi dan Modal – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan persyaratan modal minimum bagi BPR, yang dapat menjadi tantangan bagi BPR kecil untuk bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih besar.
4. Inovasi Produk dan Layanan – BPR harus terus mengembangkan produk seperti mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya agar tetap relevan.
5. Kolaborasi dan Kemitraan – Beberapa BPR mulai menjalin kemitraan dengan asosiasi bisnis lokal dan lembaga pendidikan untuk memperluas jaringan pelanggan.

Berbagai tantangan diatas sangat berpengaruh dalam peningkatan usaha dan operasional perusahaan untuk itu pengembangan baik secara ketentuan internal, penyesuaian terhadap kebijakan regulasi dan penguatan Infrastruktur teknologi informasi dan SDM di PT BPR Shinta Bhakti Wedi akan lebih dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha Operasional BPR.

IV. Strategi dan kebijakan Manajemen

Strategi dan kebijakan manajemen di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Berikut beberapa aspek utama dalam strategi dan kebijakan manajemen BPR Shinta Bhakti Wedi.

1. Strategi Pengelolaan Kredit

- ✓ Fokus pada sektor produktif terutama pada usaha masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal
- ✓ Penerapan analisis kredit yang ketat guna mengurangi risiko Non-Performing Loan (NPL).
- ✓ Penyesuaian suku bunga yang kompetitif agar tetap menarik bagi nasabah.

2. Manajemen Risiko.

- ✓ Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menghindari kredit macet.
- ✓ Pengawasan terhadap penggunaan dana dan kepatuhan terhadap regulasi OJK.
- ✓ Diversifikasi portofolio kredit untuk mengurangi risiko keuangan

2. Strategi Digitalisasi

- ✓ Peningkatan kerjasama dengan lembaga Jasa Keuangan yang lain guna memberikan kemudahan akses fasilitas Pembayaran yang dibutuhkan oleh nasabah melalui VA yang telah dilakukan kerjasama dengan Bank Danamon dan Bank BRI Yang masih dalam proses. Serta pembukaan rekening di Bank Permata, BNI, Mandiri.
- ✓ Pengembangan Aplikasi Core banking guna memenuhi berbagai kebijakan Reguator terutama terkait dengan perubahan akutansi EP yang mulai berlaku Januari 2025 dan pengembangan system pelaporan yang berhungan baik untuk pihak internal, eksternal serta pihak terkait.

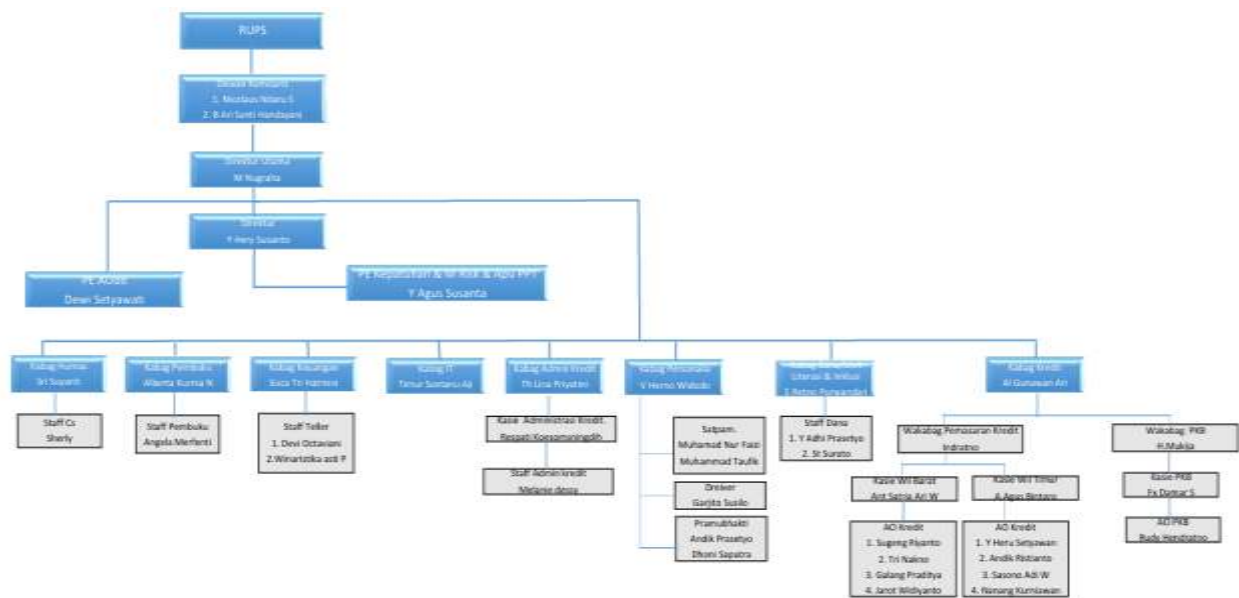
3. Penguatan Sumber Daya Manusia

- ✓ Pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Pelatihan direalisasikan dengan mengikuti berbagai event yang diselenggarakan oleh pihak terkait serta pengembangan pelatihan di internal BPR Shinta Bhakti wedi.

4. Kebijakan Penghimpunan Dana

- ✓ Menawarkan produk simpanan dengan suku bunga kompetitif untuk menarik lebih banyak nasabah, dalam penetapan suku bunga yang ditawarkan senantiasa melihat tingkat suku bunga LPS.
- ✓ Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan pelayanan yang baik.

V.Struktur Organisasi PT BPR Shinta Bhakti Wedi.



VI. Bidang Usaha

Bank Perekonomian Rakyat Shinta Bhakti Wedi adalah lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan bank umum, BPR tidak memberikan layanan lalu lintas pembayaran seperti giro. Bidang usaha BPR SBW mencakup beberapa kegiatan utama:

- **Menghimpun dana** dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka dan tabungan.
- **Memberikan kredit** kepada masyarakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah.
- **Menempatkan dana** dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka kepada lembaga keuangan yang lain.

Produk yang telah di berikan untuk pelayanan berupa tabungan yang melayani bagi berbagai segmen masarakat umum, pegawai, instansi dan pelajar, pelayanan produk kredit berupa kredit umum dan pegawai, serta layanan Deposito dengan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.

VII. Tekonologi Informasi.

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS melalui POJK Nomor 75/POJK.03/2016. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan oleh BPR aman, efisien, dan mendukung layanan perbankan yang optimal. Selain itu, OJK juga mendorong transformasi digital di BPR Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas layanan, serta inklusi keuangan bagi masyarakat. Salah satu langkah utama adalah

mendorong BPR untuk mengadopsi teknologi digital dalam layanan perbankan, sehingga nasabah dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.

PT BPR Shinta Bhakti telah menggunakan teknologi informasi guna mendukung dalam operasional perusahaan dengan bekerjasama dengan Vendor PT Ussi Bandung yang telah menjalin kerjasama selama kurang lebih 5 tahun. Pengembangan support terhadap aplikasi yang dibutuhkan guna mengikuti ketentuan dari regulasi yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan transaksi secara digital juga telah diterapkan dalam bentuk penyediaan VA bagi nasabah dan pembukaan rekening pada lembaga jasa keuangan lainnya yang dapat memudahkan transaksi bagi nasabah.

Penguatan dalam penggunaan teknologi terkini baik secara infrastruktur jaringan dan Hardware telah ditingkatkan guna mendukung operasional yang handal dari teknologi informasi yang telah diterapkan saat ini dan dari segi SDM pelaksana terus ditingkatkan dari segi kemampuan yang dimiliki.

VIII. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain.

Dalam Kinerja operasional perusahaan PT BPR SBW telah melakukan Kerjasama dengan beberapa lembaga jasa keuangan dan instansi terkait guna mendukung kebutuhan dari operasional perusahaan.

A. Lembaga Keuangan Yang telah bekerjasama dengan Bank SBW

1. Bank Umum Bank BNI 46, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Permata, Bank BSI, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Niaga
2. Bank Perekonomian Rakyat: BPR Profidana, BPR Bhakti Riyadi, BPR Shinta Putra Pengasih, BPR Panca Arta Mojali, BPR Arta Sari Sentosa, BPR Ceper, BPR Kartasura Saribumi, BPR UKabima BMMS, BPR Hardi Mas Mandiri.

Kerjasama yang diberikan oleh lembaga keuangan berupa pembukaan rekening buat penempatan dana, fasilitas buat transfer pembayaran dari nasabah dan terdapat juga VA untuk transaksi nasabah.

B. Lembaga atau instansi Non Perbankan

1. PT Ussi Bandung selaku vendor yang memberikan support dalam Core Banking yang digunakan oleh PT BPR SBW.
2. PT Scorpio selaku penyelenggara kebutuhan SDM untuk bidang Securiti dan Cleaning service.

IX. Perkembangan Pasar dan Target Pasar.

Perkembangan Pasar.

Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berkembang serta perlu peningkatan daya saing BPR melalui Roadmap penguatan struktur, akselerasi digitalisasi, serta penguatan peran BPR dalam wilayahnya. Peran Perbankan terutama BPR saat ini mempunyai peran yang cukup signifikan terutama untuk masyarakat umum di lingkup pedesaan namun seiring perkembangan teknologi saat ini perlu penyesuaian terhadap kinerja dan kapasitas pelayanan yang diberikan oleh BPR. Untuk itu BPR Shinta Bhakti Wedi dalam kinerja operasional telah mengembangkan :

- Digitalisasi BPR SBW dengan semakin mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.
- Dalam menghadapi persaingan kredit yang semakin ketat dalam penyaluran kredit kepada segmen mikro dan kecil dengan memperluas pemasaran.
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan ruang lebih luas bagi BPR SBW untuk berkembang.

Target Pasar BPR

BPR SBW berfokus pada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum, terutama:

- **UMKM:** BPR sbw menjadi sumber pembiayaan utama bagi usaha mikro dan kecil.
- **Masyarakat Pedesaan:** BPR sbw berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah.
- **Individu dengan akses terbatas ke perbankan:** BPR menawarkan layanan yang lebih fleksibel dibandingkan bank konvensional.

Dengan strategi ini, BPR sbw diharapkan semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan tetap relevan bagi masyarakat. Pengembangan kebijakan dan variasi produk yang ditawarkan juga menjadi salah satu tujuan pengembangan target yang akan dicapai.

X. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Periode kerja di tahun 2024 telah dilaksanakan program guna pengembangan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan internal dan mengikuti program latihan yang diselenggarakan pihak terkait. Pelatihan yang telah direalisasikan adalah:

1. Pelatihan Implementasi SAK EP yang diselenggarakan Perbarindo, pada tanggal 15 Januari 2024 yang diikuti oleh kabag IT Dan PE Kepatuhan
2. Pelatihan Konsultan Pajak yang diselenggarakan DJP Pratama Yogyakarta, pada tanggal 15 Januari 2024 diikuti oleh kabag akuntansi.

3. Pelatihan POJK no 1 Kualitas asset diselenggarakan oleh perbarindo pada tanggal 19 februari 2024 yang diikuti oleh kabag Kredit, Dana & PE Kepatuhan.
4. Pelatihan Aplikasi USSI untuk implementasi SAK EP pada Core banking diselenggarakan oleh PT USSI diikuti oleh Kabag IT.
5. Pelatihan Tentang CKPN dan Kualitas Aset yang diselenggarakan perbarindo pada tanggal 20 Mei 2024 diikuti oleh kabag kredit dan PE Kepatuhan.
6. Pelatihan dan sosialisasi Sertifikat Tanah elektronik diselenggarakan oleh Badab Pertanahan Kleten pada tanggal 03 Juli 2024 diikuti oleh kabag Administrasi kredit Dan Wakabag Kredit.
7. Pelatihan Audit Internal perbakaan disenggarakan Perbarindo Solo pada tanggal 23 Juli 2024 diikuti oleh PE Audit.
8. Pelatihan Marketing kredit diselenggarakan perbarindo pada tanggal 21 agustus 2024 diikiuti oleh staff humas dan teller.
9. Pelatihan Core banking oleh PT USSI Bandung pada Tanggal 28 Oktober 2024 diikuti oleh Kabag IT.
10. Pelatihan mengenai penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh perbarindo pada tanggal 05 November 2024 diikuti oleh PE Kepatuhan.
11. Pelatihan Internal Untuk seluruh Karyawan Mengenai APU & PPT dan Anti fraud diselenggarakan pada tanggal 19 November 2024.
12. Pelatihan Marketing kredit diselenggarakan oleh perbarindo pada tanggal 05 Desember 2024 diikuti oleh 2 Staff Kredit.

XI. Laporan Posisi Keuangan.**Laporan Posisi Keuangan**

(Audited)

(Dalam satuan rupiah)

ASET	Dec-24	Dec-23
Kas dalam Rupiah	735.717.300	530.545.950
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	18.748.747.655	20.843.986.091
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	94.678	8.769.678
Jumlah	18.748.652.977	20.835.216.413
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	507.466.014	671.996.420
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	63.741.810.063	64.682.022.131
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	2.542.988.817	2.709.388.817
Penyertaan Modal	0	0
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	0	0
Jumlah	61.706.287.260	62.644.629.734
Agunan yang Diambil Alih	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	2.485.568.850	2.485.568.850
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	2.043.488.404	1.890.122.693
c. Inventaris	1.394.759.961	1.342.714.961
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	924.501.292	779.201.778
Aset Tidak Berwujud	206.877.500	198.765.000
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	199.580.622	194.806.659
Aset Lainnya	917.571.123	995.431.683
Total Aset	83.027.864.653	86.168.741.461
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	156.589.633	160.219.825
Simpanan		
a. Tabungan	30.122.715.009	34.103.179.143
b. Deposito	42.390.456.200	41.257.065.200
Simpanan dari Bank Lain	166.589.608	251.476.421
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	431.959.420	581.160.524
Total Liabilitas	73.268.309.870	76.353.101.113

EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	15.000.000.000	5.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	10.473.000.000	473.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio (Disagio)	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	3.848.452.266	3.516.452.266
b. Tujuan	112.188.082	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	0	0
b. Tahun Berjalan	1.271.914.435	1.772.188.082
Total Ekuitas	9.759.554.783	9.815.640.348

Laporan Laba Rugi.

(Audited)	(Dalam satuan rupiah)	
POS	Dec-24	Dec-23
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	9.324.474.907	9.300.241.195
b. Provisi Kredit	700.860.550	797.354.572
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	10.025.335.457	10.097.595.767
Pendapatan Lainnya	650.257.425	910.674.241
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	10.675.592.882	11.008.270.008
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	3.203.001.047	2.964.262.082
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	248.625.000	84.500.000
Beban Pemasaran	330.782.846	415.166.290
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	5.109.098.609	5.210.584.759
Beban Lainnya	111.196.966	125.276.934
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	9.002.704.468	8.799.790.065
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.672.888.414	2.208.479.943
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	27.844.157	141.805.198
Beban Non Operasional	121.205.414	158.058.260
Kerugian Penjualan/Kehilangan	0	0
Lainnya	0	0
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(93.361.257)	(16.253.062)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.579.527.157	2.192.226.882
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	307.612.722	420.038.800
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.271.914.435	1.772.188.082
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan a. Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0	0

Laporan Kualitas Aset.

(Audited)

(Dalam satuan rupiah)

Keterangan	Nominal Dalam satuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Penempatan pada bank lain	18.748.747.655		0		0	18.748.747.655
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	513.227.471	0	0	0	0	513.227.471
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	46.290.467.925	9.208.057.165	305.922.420	1.354.759.129	6.905.695.749	64.064.902.388
Jumlah Aset Produktif	65.552.443.051	9.208.057.165	305.922.420	1.354.759.129	6.905.695.749	83.326.877.514
Rasio – rasio (%)						
a. KPMM	30,67					
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00					
c. NPL (neto)	9,70					
d. Non Performing Loan (NPL) Gross	13,27					
e. ROA	1,88					
f. BOPO	84,33					
g. Net Interest Margin (NIM)	8,09					
h. LDR	79,10					
i. Cash Ratio	19,29					

Laporan Komitmen & Kontijensi.

(Audited)

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Dec-24	Dec-23
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	2.858.032.512	2.576.901.216
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	2.001.749.612	1.720.618.316
b. Aset produktif yang dihapus buku	354.282.900	354.282.900
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	502.000.000	502.000.000
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo akhir 31 Desember 2023	4.527.000.000	3.516.452.266	1.772.188.082	9.815.640.348
Pembentukan Cadangan Umum		332.000.000	(332.000.000)	-
Pembagian Dividen			(1.128.800.000)	(1.128.800.000)
Bonus Direksi			(132.800.000)	(132.800.000)
Bonus Dewan Komisaris			(66.400.000)	(66.400.000)
Laba Bersih Tahun Berjalan			1.271.914.435	1.271.914.435
Saldo 31 Desember 2024	4.527.000.000	3.848.452.266	1.384.102.517	9.759.554.783

Laporan Arus Kas

PT. BPR SHINTA BHAKTI WEDI
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Tahun Berjalan	1.271.914.435	1.772.188.082
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan Aset Tetap	298.665.225	21.663.422
Penyisihan Kerugian (Penempatan Pada Bank Lain)	(8.675.000)	(31.000.000)
Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan	(106.083)	1.072.636
Penyisihan Kerugian (Kredit Yang Diberikan)	(166.400.000)	(529.000.000)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.773.963	6.925.000
(Kenaikan) penurunan aset dan kewajiban operasi:		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	9.461.365	24.926.419
Penempatan pada Bank Lain	2.095.238.436	9.494.516.303
Kredit yang Diberikan	1.166.198.917	(6.606.657.881)
Provisi	(38.054.455)	28.343.470
Administrasi Kredit	(23.295.905)	(80.416.832)
Aset Lain-lain	68.399.195	(19.725.955)
Kewajiban Segera Dibayar	(3.630.192)	16.330.221
Utang Bunga	3.372.199	18.500.079
Simpanan	(2.847.073.134)	(3.178.037.174)
Simpanan Dari Bank Lain	(84.886.813)	(22.353.647)
Kewajiban Lain-lain	(152.573.303)	163.230.047
Arus kas neto dari aktivitas operasi	1.593.328.850	1.080.504.190
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(52.045.000)	(155.619.740)
Pembelian/penjualan Aset Tidak Berwujud	(8.112.500)	-
Arus kas neto untuk aktivitas investasi	(60.157.500)	(155.619.740)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembentukan Cadangan Umum	-	-
Pembagian Dividen	(1.128.800.000)	(958.919.000)
Bonus Direksi	(132.800.000)	(112.814.000)
Bonus Dewan Komisaris	(66.400.000)	(56.407.000)
Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan	(1.328.000.000)	(1.128.140.000)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	205.171.350	(203.255.550)
Kas pada Awal Periode	530.545.950	733.801.500
Kas pada Akhir Periode	735.717.300	530.545.950
Kenaikan (Penurunan) Kas	205.171.350	(203.255.550)



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00025/2.1358/AU.2/07/0906-1/1/II/2025

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Shinta Bhakti Wedi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Shinta Bhakti Wedi, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT. BPR Shinta Bhakti Wedi terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, laporan laba rugi dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-Hal Lain

Laporan Keuangan PT. BPR Shinta Bhakti Wedi per 31 Desember 2023, diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro, MM, Ak, CPA, CA dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai laporannya No: 00014/2.0626/AU.2/07/0280-3/1/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRP. AP.0906

Yogyakarta, 14 Februari 2025: DK



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SHINTA BHAKTI WEDI
TAHUN 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M Nugraha** – Direktur Utama
2. **Y Hery Susanta** – Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan tahunan BPR Shinta Bhakti Wedi tahun 2024 telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan serta operasional perusahaan secara benar dan akurat.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas isi laporan tahunan ini, termasuk keakuratan data dan informasi yang disajikan.
3. Laporan ini telah diaudit oleh auditor independen dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Tidak terdapat informasi yang disembunyikan atau disajikan secara tidak benar yang dapat mempengaruhi pemahaman pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap kondisi perusahaan.
5. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi dalam operasional BPR.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 30 April 2025

Direktur Utama



[M Nugraha]

Direktur



[Y Hery Susanta]

XII. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Penjabaran hasil penilaian terhadap penerapan tata kelola:

Struktur

1. Struktur komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
2. Jumlah Anggota Direksi terisi lengkap sesuai ketentuan OJK yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3. Jumlah anggota Komisaris terdiri 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
4. BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite karena modal inti < Rp 50 miliar.
5. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan.
6. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK.
10. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
12. BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR (RBB) termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

Proses.

1. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ Dewan Komisaris antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/ atau bentuk lain.
2. Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
3. Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
4. BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite karena modal inti < Rp 50 miliar.
5. Tidak terdapat benturan kepentingan selama Tahun 2024

6. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
7. BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. BPR menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan POJK dan memperoleh persetujuan RUPS.
9. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. BPR secara berkala telah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
11. BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
12. Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable).

Hasil.

1. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
2. Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
4. BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite karena modal inti < Rp 50 miliar.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
6. BPR berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
7. BPR telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu dan menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
9. BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
10. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat

13. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola: 2

Kesimpulan: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

XIII. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.

1. Pelasanaan Tugas dan tanggung jawab Dirut.

Nama: M Nugraha

Jabatan: Direktur Utama.

Tanggung Jawab:

1. Memimpin dan mengelola PT BPR Shinta Bhakti Wedi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan dan Program yang telah disampaikan dan disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kinerja Bank.
3. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan rencana, pengawasan, pengendalian operasional Bank.
4. Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi pembinaan dan pengelolaan kredit, dana, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional dan mobilisasi dana, pengembangan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, serta meningkatkan citra positif Bank di masyarakat.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Rincian Tugas:

1. Memprakarsai penyusunan program kerja dan rencana anggaran yang akan ditetapkan menjadi target yang akan dicapai oleh perusahaan.
2. Mengevaluasi dan menganalisis perkembangan bank.
3. Mengendalikan dan menentukan langkah-langkah pengawasan operasional bank.
4. Melakukan penilaian, menyetujui, menerima atau menolak realisasi semua transaksi produk perbankan berdasarkan kewenangan tertinggi yang ada.
5. Memonitor dan mengawasi berlangsungnya kegiatan administrasi pelayanan perbankan.
6. Memutus plafond kredit yang diusulkan oleh bagian terkait yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan Ketentuan penyaluran kredit mengenai BMPK kredit.

7. Meninjau kembali, meneliti, menilai dan menyetujui atau menolak permohonan kredit yang telah diproses dan dinilai bawahan (Account Officer, Kasi Kredit, wakabg Kredit dan Kabag Kredit)

2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dir.

Nama: Y Heri Susanta

Jabatan: Direktur

Tanggung Jawab

1. Bersama-sama Direktur Utama dalam hal mengamankan semua Keputusan dan Kebijakan Direksi, baik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) atau melalui Surat Edaran (SE) lainnya serta Memo Direksi.
2. Bersama-sama Direktur Utama melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.
3. Menjamin terlaksananya rencana kerja yang akan dicapai oleh masing-masing unit tugas dari tingkat Kepala Divisi sampai dengan pelaksana, melalui pengawasan dan evaluasi hierarkis yang dapat dikendalikan lewat jalur Struktur Organisasi.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Rincian Tugas

1. Bersama-sama Direktur Utama mengambil langkah-langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.
2. Melakukan pengawasan atas terlaksananya program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
3. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme).
4. Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
5. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis.
6. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
7. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.

XIV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

1. Nama: Nicholaus Ndaru Sunarwibowo

Jabatan: Komisaris Utama

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan
4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rincian Tugas

1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.
2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.
4. Mengawasi pekerjaan Direksi.
5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
7. Mengawasi pelaksanaan APU (Anti Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Proliferasi.
8. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
10. Memastikan Kepatuhan Terhadap penerapan regulasi yang dikelurkan oleh pihak terkait.
11. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
12. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Nama B Ari Santi Handayani

Jabatan: Komisaris

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.
4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rincian Tugas

1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.
2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.
4. Mengawasi pekerjaan Direksi.
5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
7. Mengawasi pelaksanaan APU (Anti Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Proliferasi.
8. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
9. Memastikan Kepatuhan Terhadap penerapan regulasi yang dikelurakan oleh pihak terkait
10. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.

XV. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Tidak terdapat komite di PT BPR Shinta Bhakti Wedi.

XVI. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tidak terdapat komite di PT BPR Shinta Bhakti Wedi.

XVII. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham.

Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
M Nugraha	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	6,78	6,78
Y Hery Susanta	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	1,1	1,1
Anggota Dewan Komisaris			
Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	3,98	3,98
B Ari Santi Handayani	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	3,82	3,82
Pemegang Saham			
Drs. Eka Noor Asmar, Mba,Akt	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	27,39	37,39
Theresia Maria Siti Purwantati	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	1,1	1,1
Elisabeth Arum Damayanti	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	8,06	8,06
Wira Adiyaksa	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	6,78	6,78
Florentina Sumarni	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	0,55	0,55
Theresia Nani Sulistiati	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	7,62	7,62
Anton subekti	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	3,87	3,87
Berta Tatiek Suryanto	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	2,43	2,43
Alberta Kurnia Noventiara D	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	1,1	1,1
Rosalia Indirawati	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	3,31	3,31
Paulus Ary Mardiyanto	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	0,33	0,33
Siverius Suryanto	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	1,99	1,99
Agustinus Endriyanto	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	0,66	0,66
Monica Suprpto Martono	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	6,07	6,07
Christiana Chatriningsih	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	12,22	12,22
Joyce Eriawati	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	0,77	0,77
Emiria Surati	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	0,68	0,68
Irene Wahyuningrum	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	0,44	0,44
Robertus Iwan Yuniantara	PT BPR Shinta Bhakti Wedi	1,1	1,1

XVIII. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Nama	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
M Nugraha	PT BPR Shinta Daya	5,18%
Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	PT BPR Shinta Daya	8,68%
B Ari Santi Handayani	PT BPR Shinta Daya	4,09%
B Ari Santi Handayani	PT BPR Shinta Putra Pengasih	4,3%
B Ari Santi Handayani	PT BPR Bhakti Daya Ekonomi	1,20%

XIX. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Anggota Dewan Komisaris			
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pemegang Saham			
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

XX. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
M Nugraha	Tidak ada	Tidak ada	Theresia Nani sulistiati-kakak kandung
Y Hery Susanta	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Anggota Dewan Komisaris			
Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	Tidak Ada	Tidak Ada	Elisabet Arum Damayanti-kakak kandung
B Ari Santi Handayani	Tidak Ada	Tidak Ada	Aloysius Adinta sentosa-adik
Pemegang Saham			
Drs. Eka Noor Asmara,Mba, Akt	Tidak Ada	Tidak Ada	Joyce Eriawati - istri
Alberta Kuria N D	Tidak Ada	Tidak Ada	Florentina Sumarni-ibu kandung

XXI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	Rp. 571.800.000	2	Rp. 257.400.000
Tunjangan	2	Rp. 107.166.500	2	Rp. 23.134.200
Tantiem	2	Rp. 114.472.000	2	Rp. 57.236.000
Kompensasi berbasis saham	0		0	
Remunerasi lainnya	2	Rp. 30.150.000	0	
Total Remunerasi		823.588.500		337.770.200
Fasilitas Lain				
Perumahan	0		0	0
Transportasi	2	324.190.752	0	0
Asuransi Kesehatan	2	17.928.600	2	17.928.600
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		342.119.352		17.928.600
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.165.707.852		355.698.800

XXII. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,2 : 1

XXIII. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
07 Februari 2024	4	Pencapaian hasil rencana kerja dan kondisi NPL
04 April 2024	4	Tindak Lanjut Hasil temuan audit dan pembahasan pencapaian target rencana bisnis
15 Juni 2024	4	Pembahasan pencapaian target dana pihak ketiga dan review ketentuan dan kondisi kredit
11 September 2024	4	Pencapaian Rencana Bisnis, Analisa pertumbuhan CKPN dan penyelesaian kredit bermasalah

XXIV. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	4	0	100
B Ari santi Handayani	4	0	100

XXV. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

XXVI. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

XXVII. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

XXVIII. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
26 Februari 2024	Bhakti sosial Perbarindo	Kegiatan Sosial Perbarindo	Panitia Perbarindo	Rp. 400.000
25 April 2024	Kegiatan perpisahan sekolah	Panitia Sekolah	Panitia Sekolah	Rp. 850.000
02 Mei 2024	HUT Paroki Gondang	Kegiatan ulang tahun Gereja	Panitia Hut Paroki	Rp. 500.000
29 Mei 2024	HUT Paroki Wedi	Kegiatan ulang tahun Gereja	Panitia Hut Paroki	Rp. 500.000
19 Juni 2024	Ulang Tahun Polres Klaten	Kegiatan Hut Polres Klaten	Panitian HUT Polres	Rp. 360.000
17 Juli 2024	Hut Desa Pandes	Peringatan Hut Pandes	Panitia HUT Pandes	Rp. 200.000
29 Juli 2024	Hari jadi Kabupaten Klaten	Peringatan Hari Jadi Kab Klaten	Panitia Hut Kab Klaten	Rp. 125.000
07 Agustus 2024	Peringatan HUT RI Klaten	Peringatan Hut Kemerdikaan RI	Panitia HUT RI Desa Ngering	Rp. 300.000
14 Agustus 2024	Peringatan HUT RI Klaten	Peringatan Hut Kemerdikaan RI	Panitia HUT RI Kec Wedi	Rp. 500.000
23 September 2024	Beasiswa YKPN	Beasiswa	AA YKPN	Rp. 400.000
23 Oktober 2024	Donatur SD PL Soegiyopranoto	Kegiatan sekolah	Panitia	Rp. 250.000